JURNAL GOVERNANCE
Vol.4, No. 3, 2026
ISSN: 2088-2815

Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Di Pantai Malalayang Kompleks Lorong Orang Sanger, Kota Manado)

Nicky Gllend Talumesang [1]
Sofia E. Pangemanan [2]
Herman Nayoan [3]

Email Korespondensi: ntalumesang1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Pantai Malalayang, Kompleks Lorong Orang Sanger, Kota Manado, serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada empat aspek pemberdayaan, yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan informan dari pemerintah, kelompok nelayan, nelayan, dan masyarakat pesisir. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan pemberdayaan melalui pelatihan, bantuan sarana dan prasarana perikanan, bantuan pengolahan hasil perikanan, serta pembinaan kelompok nelayan. Namun, pelaksanaannya belum optimal dan berkelanjutan. Pelatihan masih berfokus pada kelompok aktif, sementara dalam lima tahun terakhir belum terdapat program atau bantuan baru di lokasi penelitian. Kegiatan pembersihan lingkungan pesisir juga mulai jarang dilakukan. Pada aspek kelembagaan, sejumlah kelompok nelayan tidak lagi aktif akibat faktor usia, meninggal dunia, dan kurangnya regenerasi, sedangkan FORNEL yang masih aktif belum memperoleh legalitas formal sehingga mengalami hambatan dalam mengakses bantuan. Kendala lainnya berupa lemahnya pelaporan dan transparansi dalam pengelolaan bantuan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan berkelanjutan, percepatan legalitas FORNEL, penyusunan program bantuan yang merata, serta penguatan transparansi dan tata kelola kelembagaan.

Kata Kunci : Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat, Pesisir, Nelayan.

[1]Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat
[2] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat
[3] Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

Pendahuluan

Wilayah pesisir merupakan kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan berperan penting dalam menunjang kehidupan masyarakat, khususnya nelayan. Namun, masyarakat pesisir masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, akses terhadap modal, serta ketergantungan yang tinggi terhadap kondisi cuaca. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat pesisir.

Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki melalui pembinaan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pelestarian lingkungan, dan penguatan kelembagaan. Keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh pemberian bantuan, tetapi juga oleh keberlanjutan program, partisipasi masyarakat, serta efektivitas pembinaan yang dilakukan pemerintah.

Pantai Malalayang, Kompleks Lorong Orang Sanger, Kota Manado merupakan salah satu kawasan pesisir yang masih menjadi lokasi aktivitas nelayan tradisional. Pemerintah melalui Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Manado telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan berupa pelatihan, bantuan sarana perikanan, serta pembinaan kelompok nelayan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan berbagai kendala, seperti belum meratanya pelatihan dan bantuan, adanya kelompok nelayan yang tidak aktif, serta belum adanya program pemberdayaan baru yang diterima masyarakat dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Pantai Malalayang, Kompleks Lorong Orang Sanger, Kota Manado dengan menggunakan empat aspek pemberdayaan, yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat pesisir.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menggali fenomena secara holistik dan mendalam langsung dari latar alamiahnya. Penelitian dilaksanakan di dua lokasi utama, yaitu kawasan permukiman pesisir Pantai Malalayang, Kompleks Lorong Orang Sanger (LOS), Kelurahan Malalayang Satu Timur, serta Kantor Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Manado yang berlokasi di Gedung Graha Religi Kalimas Manado.

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling berdasarkan kriteria keterlibatan, pemahaman, dan pengalaman langsung terhadap program pemberdayaan masyarakat pesisir. Informan penelitian terdiri atas Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Manado, yaitu Ir. Rizal S.

Sapulete; para ketua kelompok nelayan dan pengolah hasil perikanan di Kompleks LOS, yaitu Yehezkiel Makausi (Malos 1), Benny Sumayouw (Malos 3), Lisbeth Tatuhas (Delima dan Poklahsar Delima), serta Jhon Manope (FORNEL); nelayan tradisional lokal, yaitu Om Max, Om Epo/Gatonepo, dan Matheos Kakauhe; serta masyarakat pesisir sekitar, yaitu Ibu Din dan Bapak Indra.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi lapangan terhadap aktivitas nelayan dan kondisi lingkungan pesisir, wawancara mendalam (in-depth interview) secara semi-terstruktur, serta dokumentasi berupa arsip dan foto kegiatan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan member check. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan yang saling berkaitan, yaitu reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel sintesis, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Pembahasan

Kajian peran pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berakar pada teori peran (role theory), yang memandang peran sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari suatu lembaga atau individu sesuai dengan posisi sosial dan kewenangan hukum yang diembannya. Menurut Labolo (2017), pemerintah merupakan instrumen publik yang memiliki kewenangan legitimatik untuk mengatur, mengurus, dan melayani masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, Ryaas Rasyid (2010) memetakan tiga fungsi vital pemerintah, yaitu peran regulator (membuat dan menetapkan kebijakan serta kepastian hukum), peran fasilitator (menyediakan kemudahan, sarana dan prasarana, akses permodalan perikanan, serta pendampingan), dan peran dinamisator (memberikan motivasi, bimbingan intensif, serta menggerakkan partisipasi swadaya masyarakat).

Sementara itu, teori pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (1999) dan Mardikanto (2019) menempatkan pemberdayaan sebagai upaya strategis untuk memandirikan dan memampukan masyarakat lapisan bawah. Mardikanto (2013) mengembangkan konsep ini menjadi empat dimensi utama pemberdayaan masyarakat pesisir, yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Pembahasan berikut menganalisis implementasi keempat dimensi tersebut berdasarkan temuan faktual di lokasi penelitian Pantai Malalayang, Kompleks Lorong Orang Sanger, Kota Manado.

1. Bina Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan, Ir. Rizal S. Sapulete, pemerintah daerah telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan pelatihan teknis bagi masyarakat pesisir Kota Manado. Pelatihan tersebut mencakup teknik perawatan dan perbaikan mesin katinting, sosialisasi program konversi bahan bakar minyak ke gas LPG untuk efisiensi biaya melaut, pembuatan rumpon atau pemikat ikan, teknik penangkapan ikan ramah lingkungan, serta pelatihan pengolahan hasil perikanan seperti pembuatan bakso ikan, nugget, kerupuk ikan, dan abon

ikan cakalang bagi kelompok perempuan pesisir.

Penuturan para ketua kelompok membenarkan pernah adanya pelaksanaan pelatihan tersebut pada masa lalu. Ketua Malos 1, Yehezkiel Makausi, dan Ketua Malos 3, Benny Sumayouw, mengonfirmasi bahwa anggota kelompok mereka pernah mengikuti pelatihan pembuatan umpan, perakitan rumpon, dan pelatihan mesin katinting berbahan bakar gas yang dinilai memberikan pengetahuan praktis dalam menunjang operasional melaut. Begitu pula Ketua Poklahsar Delima, Lisbeth Tatuhas, yang mengapresiasi pelatihan kewirausahaan pengolahan abon cakalang dan kerupuk ikan bagi ibu-ibu pesisir.

Namun demikian, temuan empiris di lapangan mengungkap bahwa pelaksanaan bina manusia belum berjalan secara merata dan inklusif. Nelayan mandiri yang tidak tergabung dalam kelompok resmi, seperti Om Max dan Om Epo, menyatakan bahwa mereka tidak pernah diikutsertakan dalam pelatihan teknis dari dinas. Alasan utamanya adalah karena skema penyertaan pelatihan dari dinas mensyaratkan utusan dari kelompok nelayan yang terdaftar secara legal.

Hal serupa dialami oleh Ketua Forum Nelayan (FORNEL), Jhon Manope, yang mengungkapkan bahwa anggota forum yang dipimpinnya belum pernah memperoleh program pelatihan pemerintah karena Forum Nelayan hingga saat ini belum mendapatkan pengukuhan atau legalitas resmi dari dinas terkait. Masyarakat pesisir non-nelayan, seperti Ibu Din dan Bapak Indra, juga mengaku tidak pernah mendapatkan kegiatan bina manusia dari pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa bina manusia masih bersifat eksklusif dan belum mampu menjangkau kelompok rentan di luar struktur kelompok formal.

2. Bina Usaha

Aspek bina usaha merupakan dimensi yang penting dalam menyokong perekonomian nelayan tradisional di Kompleks Lorong Orang Sanger. Berdasarkan dokumen dinas dan wawancara dengan informan, pemerintah daerah pada masa lalu telah menyalurkan berbagai paket bantuan sarana dan prasarana produksi kelautan. Bantuan tersebut meliputi perahu katinting, mesin penggerak, jaring penangkap ikan, kapal berukuran di bawah 5 GT, coolbox (kotak pendingin ikan), mesin pencacah plastik, hingga armada operasional berupa kendaraan roda tiga (Viar) dan mobil box untuk mendukung rantai pasok dan pemasaran.

Rincian bantuan pada kelompok-kelompok di lokasi penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kelompok Malos 1: Pernah menerima bantuan fisik berupa 5 unit mesin katinting dan 5 unit coolbox. Bantuan tersebut sangat bermanfaat pada masanya karena menggantikan mesin-mesin tua milik nelayan yang sering mengalami kerusakan saat melaut.
2. Kelompok Malos 3: Pernah difasilitasi dalam pengajuan proposal bantuan dana hibah kelompok kepada pemerintah pusat dengan nilai mencapai Rp100.000.000. Dana tersebut dikelola untuk pembuatan armada perahu baru dan dibagikan kepada 12 anggota kelompok. Selain itu, Malos 3 bekerja sama dengan

akademisi dan dinas dalam pembuatan rumpon laut yang kemudian dikelola secara produktif sebagai tempat memancing wisatawan, sehingga turut memberdayakan anak-anak muda setempat.

3. Kelompok dan Poklahsar Delima: Merupakan kelompok penerima bantuan yang tergolong lengkap. Kelompok ini pernah memperoleh bantuan dana hibah pembuatan perahu sebesar Rp100.000.000 untuk 10 anggota, mesin gantung 15 PK, serta coolbox. Di bidang pengolahan, Poklahsar Delima menerima bantuan hibah modal Rp50.000.000, freezer pendingin, seperangkat alat pembuat bakso ikan, kendaraan Viar roda tiga, serta mobil box kecil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendukung pemasaran abon cakalang dan kerupuk ikan.
4. Kelompok Begambalo (nonaktif): Pada masa aktifnya pernah menerima bantuan perahu, mesin katinting, serta bantuan dana pendirian unit toko sembako kelompok yang menyediakan kebutuhan pokok dan perlengkapan melaut. Sebagian hasil pengusahaan kelompok Begambalo dialokasikan untuk pembelian lahan perkuburan khusus nelayan (Lahan Perkuburan Begambalo) yang hingga kini masih memberikan manfaat sosial bagi masyarakat nelayan saat berduka.

Di balik riwayat penyaluran bantuan tersebut, penelitian ini menemukan temuan krusial. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para ketua kelompok, yaitu Malos 1, Malos 3, Delima, dan FORNEL, serta para nelayan lokal, terungkap bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu periode 2021–2026, tidak ada program atau bantuan usaha baru yang diterima oleh masyarakat nelayan di lokasi penelitian Pantai Malalayang, Kompleks Lorong Orang Sanger. Bantuan-bantuan yang disebutkan sebelumnya merupakan program lama yang diberikan pada kisaran tahun 2015 hingga 2020.

Ketiadaan bantuan baru dalam lima tahun terakhir menyebabkan kondisi sarana produksi nelayan semakin menurun. Perahu dan mesin katinting yang ada saat ini mayoritas telah mengalami kerusakan dan keausan, sementara nelayan kesulitan menyisihkan modal untuk melakukan peremajaan alat tangkap. Nelayan mandiri seperti Om Max dan Om Epo, serta anggota Forum Nelayan (FORNEL), menegaskan bahwa mereka tidak pernah menerima bantuan usaha dari pemerintah. Skema penyaluran bantuan yang terikat pada kriteria legalitas kelompok menyebabkan nelayan di luar kelompok resmi mengalami keterbatasan akses terhadap program pemberdayaan.

3. Bina Lingkungan

Pemberdayaan melalui aspek bina lingkungan bertujuan untuk menjamin keberlanjutan ekosistem pesisir serta menciptakan lingkungan ruang hidup yang bersih, sehat, dan kondusif bagi masyarakat nelayan. Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwa pemerintah kota memiliki komitmen dalam menjaga kebersihan pesisir melalui pelaksanaan gerakan "Jumat Bersih" dan program "Indonesia Asri"

yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Kegiatan tersebut dirancang sebagai aksi gotong royong membersihkan sampah plastik di sepanjang garis pantai Manado dengan melibatkan personel ASN, TNI/Polri, serta komunitas pecinta lingkungan.

Keterangan dari informan masyarakat pesisir, yaitu Ibu Din dan Bapak Indra, serta beberapa ketua kelompok mengonfirmasi bahwa kegiatan pembersihan pantai oleh aparat pemerintah dan ASN pada hakikatnya memberikan dampak positif. Pantai Malalayang di area Lorong Orang Sanger sempat terlihat lebih tertata dan bebas dari akumulasi sampah plastik kiriman laut. Akan tetapi, hasil evaluasi menunjukkan bahwa program bina lingkungan mengalami penurunan intensitas dan kurang konsisten. Penuturan Ketua FORNEL, Jhon Manope, Ketua Poklahsar Delima, Lisbeth Tatuhas, serta para nelayan, yaitu Om Max, Om Epo, dan Matheos Kakauhe, secara seragam mengungkapkan bahwa belakangan ini kegiatan pembersihan pantai oleh pemerintah sudah sangat jarang dilaksanakan. Dampaknya, tumpukan sampah plastik kiriman dan limbah rumah tangga kembali berserakan di sekitar tambatan perahu nelayan. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu estetika kawasan permukiman pesisir, tetapi juga dapat merusak baling-baling mesin katinting serta mencemari area tangkapan ikan di sekitar pantai. Bina lingkungan terbukti belum menjadi program edukasi berbasis kesadaran dan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan, melainkan masih cenderung berupa aksi periodik.

4. Bina Kelembagaan

Dimensi bina kelembagaan merupakan fondasi penting yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan program pemberdayaan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kelembagaan masyarakat pesisir di Pantai Malalayang, Kompleks Lorong Orang Sanger, menghadapi berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan keberlangsungan kelompok, regenerasi, dan legalitas organisasi.

Berdasarkan data observasi dan wawancara, keaktifan kelompok nelayan di lokasi penelitian dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok resmi yang sudah tidak aktif dan kelompok atau wadah yang masih beraktivitas.

Kelompok resmi yang sudah tidak aktif:

1. Kelompok Malos 1: Ketua kelompok, Yehezkiel Makausi, menyatakan bahwa kelompok ini sudah bubar atau tidak aktif karena sebagian besar anggotanya telah meninggal dunia dan berusia lanjut.
2. Kelompok Malos 2: Terdata secara resmi di dinas, tetapi sudah berhenti beroperasi sepenuhnya akibat berkurangnya anggota.
3. Kelompok Begambalo: Salah satu kelompok tertua yang kini sudah tidak aktif. Seluruh aktivitas kelompok terhenti karena sebagian besar nelayan senior telah meninggal dunia.

Penyebab utama tidak aktifnya kelompok-kelompok tersebut adalah berkurangnya jumlah anggota akibat faktor usia dan kematian, yang diperparah oleh rendahnya minat generasi muda untuk meneruskan profesi sebagai nelayan. Berdasarkan

pengamatan lapangan, hanya terdapat sekitar 1–2 orang pemuda di Lorong Orang Sanger yang masih aktif melaut, sementara sebagian besar pemuda beralih profesi menjadi buruh bangunan atau pekerja sektor informal lainnya.

Kelompok atau wadah yang masih beraktivitas:

1. Kelompok Malos 3: Masih tercatat aktif, namun secara faktual pengurus yang tersisa hanya Ketua Kelompok, Benny Sumayouw (Om Karter), bersama anak-anak muda yang mengelola rumpon. Kunjungan dari dinas belakangan ini diakui hanya sebatas pengisian daftar hadir dan dokumentasi foto tanpa pembinaan substantif.
2. Poklahsar Delima: Masih berdiri sebagai kelompok usaha pengolahan ikan, tetapi menghadapi kendala tata kelola dan komunikasi.
3. Forum Nelayan (FORNEL): Merupakan organisasi swadaya yang dibentuk oleh nelayan aktif, termasuk mantan anggota kelompok yang telah bubar dan nelayan mandiri, sebagai wadah untuk berkumpul, berkoordinasi, dan merencanakan kegiatan sosial. FORNEL secara aktif menyelenggarakan pertemuan rutin setiap dua minggu sekali.

Penelitian ini mengidentifikasi tiga kendala kelembagaan utama yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan pemerintah.

1. hambatan legalitas Forum Nelayan (FORNEL). Meskipun FORNEL merupakan salah satu wadah nelayan yang aktif berinteraksi dan melakukan pertemuan rutin setiap dua minggu sekali di Lorong Orang Sanger, forum ini hingga sekarang belum memperoleh pengukuhan atau legalitas resmi dari Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Manado. Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwa penetapan kelompok resmi mensyaratkan kelompok telah terbentuk, konsisten beraktivitas, dan terdata minimal selama lima tahun. Kondisi tersebut menyebabkan FORNEL mengalami keterbatasan dalam mengakses bantuan dan pelatihan pemerintah karena belum memiliki legalitas formal.
2. lemahnya fungsi pelaporan dan monitoring. Pihak dinas mengeluhkan bahwa kelompok-kelompok nelayan yang telah menerima bantuan hibah pada masa lalu masih pasif dalam memberikan laporan pertanggungjawaban maupun perkembangan usaha secara berkala. Setelah bantuan fisik diserahkan, kelompok cenderung mengurangi komunikasi dan pelaporan sehingga dinas mengalami kesulitan dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pemetaan keaktifan kelompok.
3. permasalahan transparansi dan komunikasi program pada kasus Poklahsar Delima. Temuan dari wawancara dengan Ketua Kelompok/Poklahsar Delima, Lisbeth Tatuhas, menunjukkan bahwa kelompoknya semula dijanjikan bantuan pembangunan gedung atau fasilitas sarana pengolahan

perikanan oleh pemerintah. Bahkan, bangunan lama milik kelompok telah dibongkar. Namun, dalam pelaksanaannya, lokasi pembangunan gedung tersebut dialihkan ke wilayah lain di Kabupaten Minahasa Utara dengan alasan lokasi awal di Pantai Malalayang terlalu dekat dengan muara sungai.

Menurut keterangan informan, proyek fisik di Minahasa Utara tersebut tetap menggunakan papan nama atas nama "Kelompok Delima". Ketika pihak dinas datang untuk meminta tanda tangan persetujuan penyelesaian pekerjaan, Ibu Lisbeth menolak menandatangani dokumen tersebut karena bangunan fisik tersebut tidak dibangun di wilayah mereka. Kasus ini menunjukkan adanya persoalan dalam transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi dalam tata kelola program pemberdayaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Pantai Malalayang, Kompleks Lorong Orang Sanger, Kota Manado telah dilaksanakan melalui empat dimensi pemberdayaan, yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Namun, efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaannya masih belum optimal karena terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.

Pada aspek bina manusia, pemerintah telah melaksanakan pelatihan keterampilan melaut dan pengolahan hasil perikanan, tetapi aksesnya masih terbatas pada kelompok formal. Nelayan mandiri dan anggota FORNEL belum memperoleh kesempatan yang memadai dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pada aspek bina usaha, pemerintah pernah menyalurkan berbagai bantuan sarana perikanan kepada kelompok seperti Malos 1, Malos 3, dan Delima. Namun, dalam lima tahun terakhir (2021–2026), belum terdapat program atau bantuan baru yang diterima oleh masyarakat di lokasi penelitian.

Pada aspek bina lingkungan, kegiatan pembersihan pantai seperti Jumat Bersih yang sebelumnya dilakukan secara rutin kini mulai jarang dilaksanakan. Kondisi tersebut menyebabkan permasalahan sampah plastik di lingkungan pesisir belum dapat ditangani secara berkelanjutan.

Pada aspek bina kelembagaan, terdapat sejumlah kelompok resmi yang sudah tidak aktif, seperti Malos 1, Malos 2, dan Begambalo, yang dipengaruhi oleh faktor usia, meninggal dunia, dan kurangnya regenerasi generasi muda. Sementara itu, FORNEL yang masih aktif melakukan pertemuan setiap dua minggu sekali belum memperoleh legalitas formal dari dinas sehingga mengalami keterbatasan dalam mengakses program pemerintah. Selain itu, ditemukan kendala berupa lemahnya pelaporan kelompok serta persoalan transparansi dan komunikasi terkait pengalihan lokasi pembangunan fasilitas Poklahsar Delima.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka diajukan beberapa saran yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Manado, khususnya Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan, sebagai berikut:

Pemerataan Bina Manusia dan Bina Usaha. Pemerintah perlu memperluas akses pelatihan dan bantuan usaha agar tidak hanya berfokus pada kelompok nelayan formal yang telah lama terbentuk, tetapi juga dapat menjangkau nelayan mandiri dan kelompok masyarakat yang aktif secara swadaya. Hal ini diperlukan agar kesempatan peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha dapat diberikan secara lebih merata.

Pengadaan Program Bantuan dan Peremajaan Sarana Perikanan. Pemerintah perlu menyusun dan mengalokasikan kembali program bantuan bagi masyarakat nelayan di Kompleks Lorong Orang Sanger, khususnya dalam bentuk peremajaan sarana perikanan seperti mesin, perahu, jaring, dan coolbox. Langkah ini penting mengingat dalam lima tahun terakhir belum terdapat program atau bantuan baru yang diterima oleh masyarakat di lokasi penelitian.

Percepatan Legalitas FORNEL dan Penguatan Kelembagaan. Pemerintah perlu memfasilitasi dan mempercepat proses pengukuhan legalitas Forum Nelayan (FORNEL) sebagai wadah nelayan yang masih aktif. Legalitas tersebut penting agar FORNEL memiliki kedudukan kelembagaan yang jelas dan dapat lebih mudah mengakses program pemerintah. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pembinaan kelembagaan dan mendorong regenerasi nelayan melalui pelibatan generasi muda dalam kegiatan perikanan.

Peningkatan Konsistensi Bina Lingkungan. Pemerintah perlu mengaktifkan kembali kegiatan pembersihan lingkungan pesisir secara berkala dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat setempat. Kegiatan tersebut sebaiknya disertai dengan edukasi mengenai pengelolaan sampah dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan pesisir agar upaya menjaga lingkungan tidak hanya bersifat periodik.

Penguatan Transparansi, Pendampingan, dan Pengawasan. Pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dengan kelompok penerima bantuan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan bantuan atau proyek yang diberikan. Selain itu, pendampingan teknis, pelaporan secara berkala, serta monitoring dan evaluasi perlu diperkuat untuk memastikan bantuan dapat dimanfaatkan sesuai tujuan dan permasalahan dalam pelaksanaannya dapat segera ditindaklanjuti.

Daftar Pustaka

Achmad, W. (2022). Dimensi sosial dalam pengembangan masyarakat di wilayah pesisir. Jurnal Kewarganegaraan, 6(2), 4985–4993.

Anwar, Z., & Wahyuni. (2019). Miskin di laut yang kaya: Nelayan Indonesia dan kemiskinan. Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama, 4(1), 51–60.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Peran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. https://kbbi.kemdikbud.go.id/

Creative HUB FISIPOL UGM. (2022). Dimensi pemberdayaan masyarakat. FISIPOL Universitas Gadjah Mada.

Djamarah, S. B. (2009). Rahasia sukses belajar. Rineka Cipta.

Fitria, A. D., Sianturi, A. C. K., Salwa, F., Haridani, H., Manik, H. F., Khairani, K., Dasopang, L. M., Lestari, N., Rahmawati, N., Sagala, S. S., & Arika, R. (2024). Perilaku dan sikap karakteristik serta ekonomi masyarakat pesisir di Dusun XIV Desa Percut. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 1068–1078.

Haudi. (2021). Pengantar ilmu pemerintahan. Insan Cendekia Mandiri.

Imansyah, M. (2023). Pemberdayaan masyarakat di pesisir pantai Kota Manado menghadapi ancaman bencana tsunami guna mewujudkan masyarakat tangguh bencana. Trends in Applied Sciences, Social Sciences, and Education, 1(1), 19–26.

Julika, S. R., & Irawati, I. (2019). Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dalam mendorong pembangunan desa. Public Corner, 14(1), 1–15.

Labolo, M. (2017). Memahami ilmu pemerintahan. Rajawali Pers.

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. Alfabeta.

Margayaningsih, D. I. (2018). Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. Publiciana, 11(1), 72–88.

Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). Pemberdayaan masyarakat. Deepublish.

Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.

Muin, I. (2006). Sosiologi untuk SMA/MA kelas X. Erlangga.

Mulyana, P., Pawan, A. P., & Maabuat, E. E. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata Tondok Bakaru di Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan, 7(2), 16–32.

Poerwadarminta, W. J. S. (1995). Kamus umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.

Rasyid, M. R. (2010). Otonomi daerah dalam negara kesatuan. Pustaka Pelajar.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84.

Republik Indonesia. (2014a). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14.

Republik Indonesia. (2014b). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Sanger, M., Lasut, J., & Tumiwa, J. (2021). Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan pendapatan hasil perikanan (Studi kasus masyarakat pesisir, Kelurahan Batu Putih Bawah, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung). Jurnal Ilmiah Society, 1(1), 1–10.

Satria, A. (2015). Pengantar sosiologi masyarakat pesisir. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Suaib. (2023). Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penerbit Adab.

Sudarmanto, E., Kurniadi, E., & Wijayanti, R. (2020). Konsep dasar

pengabdian kepada masyarakat: Pembangunan dan pemberdayaan. Kita Tulis.
Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Suharto, E. (2021). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat. Refika Aditama.
Suhendra. (2006). Peranan birokrasi dalam pemberdayaan masyarakat. Alfabeta.
Sumodiningrat, G. (1999). Pemberdayaan masyarakat dan JPS. Gramedia Pustaka Utama.
Tempoh, S. M. V., Pati, A., & Rengkung, F. (2022). Peran pemerintah kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. POLITICO: Jurnal Ilmiah Ilmu Politik, 11(2), 114–131.
Wirawan, M. S. (2023). Fungsi pemerintahan Kabupaten Badung dalam membantu membangun perekonomian masyarakat. Empowestrerment: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3 (1), 57–64.